

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN REPRESENTASI RASISME PADA FILM NGENEST

Pada bab ini mendeskripsikan gambaran umum dari penelitian kualitatif yang disampaikan berdasarkan pada perspektif atau kacamata komunikasi massa. Gambaran umum pada bab ini adalah mengenai rasisme terhadap masyarakat Tionghoa yang direpresentasikan di dalam Film *Ngenest*.

2.1. Kondisi Rasisme di Indonesia Saat Ini

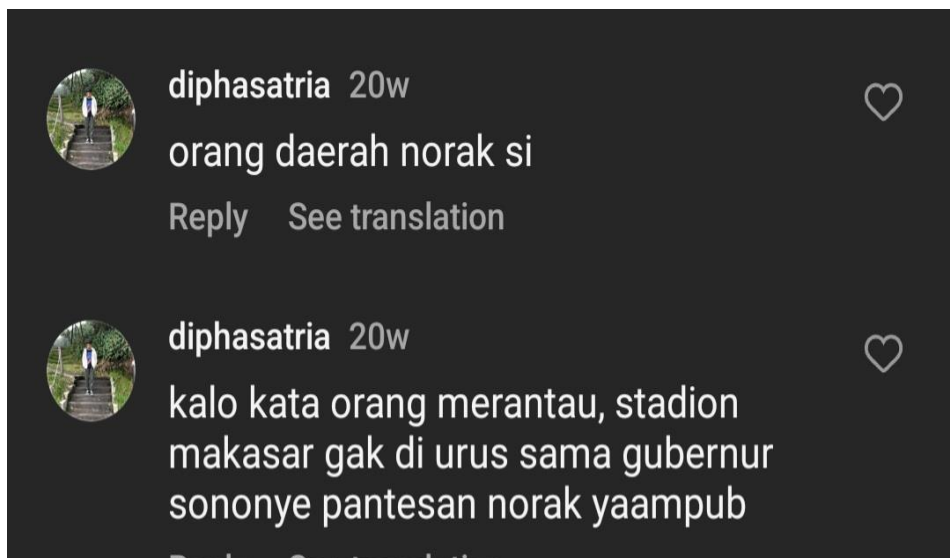
Savira, A. (2022, Oktober 11). Miris banget, indonesia negara rasisme urutan ke-14 di dunia! Diakses dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5094088/miris-banget-indonesia-negara-rasisme-urutan-ke-14-di-dunia?page=2>. Negara Indonesia menempati posisi sebagai negara yang memiliki tingkat rasisme yang cukup tinggi berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Index Mundi* pada 11 November 2022. Berdasarkan survei tersebut, Indonesia menempati posisi ke-14 sebagai salah satu negara dengan tingkat rasisme yang tinggi, dengan index poin sebesar 4,99. Melalui pernyataan tersebut menunjukkan bahwa angka rasisme di Indonesia cenderung masih tinggi dan masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan pengamalan sila ke-2 Indonesia, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan juga semboyan Indonesia, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. Tingginya angka rasisme di Indonesia dan masih banyaknya praktek dari rasisme dan diskriminasi berbasis ras merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan, karena dapat memicu terjadinya perpecahan dan mencegah terjadinya integrasi sosial.

Berkaca melalui tingginya angka rasisme di Indonesia, berikut ini merupakan contoh dari tindakan rasisme dan juga konflik antar etnis yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia:

2.1.1. Kasus rasisme yang dialami oleh pesepakbola tanah air pada bulan Juli 2023 lalu. Beberapa bulan lalu, tengah viral berita dengan topik rasisme pada liga sepakbola Negara Indonesia. Sebanyak 3 pemain dari PSM Makassar menjadi korban pelecehan rasial secara verbal di dunia maya usai berlaga dengan Persija Jakarta. Singkat cerita, perlakuan rasisme yang mereka terima disebabkan oleh cara bermain ketiga pesepakbola tersebut yang tidak bermain secara *fair play*.

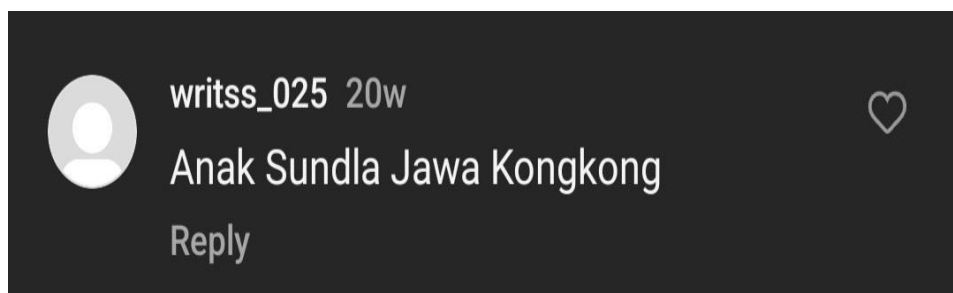
Mereka bermain dengan mengulur-ulur waktu dengan cara tiduran guling-guling di lapangan. Hal inilah yang mendorong banyak suporter baik dari PSM Makassar maupun Persija Jakarta melontarkan hujatan mereka di media sosial. Ucapan rasisme yang mereka dapati berasal dari oknum-oknum suporter sepakbola yang tidak menjunjung tinggi sportivitas olahraga.

Berikut ini merupakan beberapa contoh dari tangkap layar ujaran kebencian yang diterima oleh pemain dari *club* PSM Makassar:



Gambar 2.1: Hasil tangkap layar dari hujatan/komentar rasis dari suporter yang tidak sportif.

Sumber: Postingan dari laman Instagram @psm_makassar, 2023.



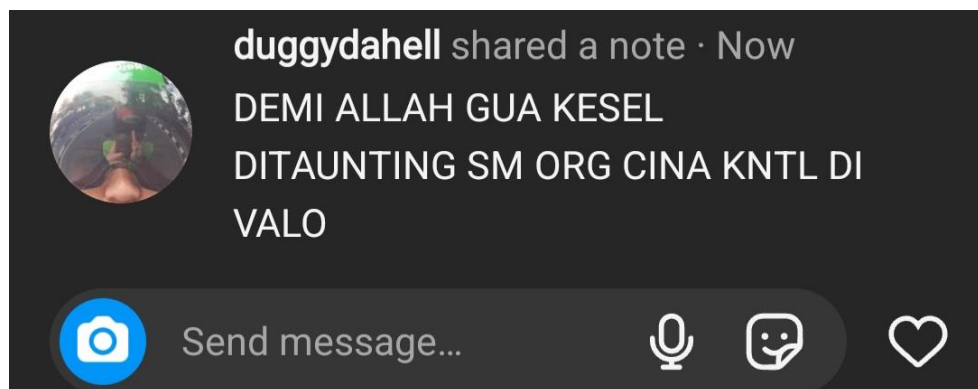
Gambar 2.2: Hasil tangkap layar dari ujaran rasial yang diterima oleh PSM Makassar.

Sumber: Postingan dari laman Instagram @psm_makassar, 2023.

2.1.2. Kasus politik identitas yang dilakukan oleh Senator DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, pada Januari 2024 lalu. Mantan DPD RI tersebut menunjukkan

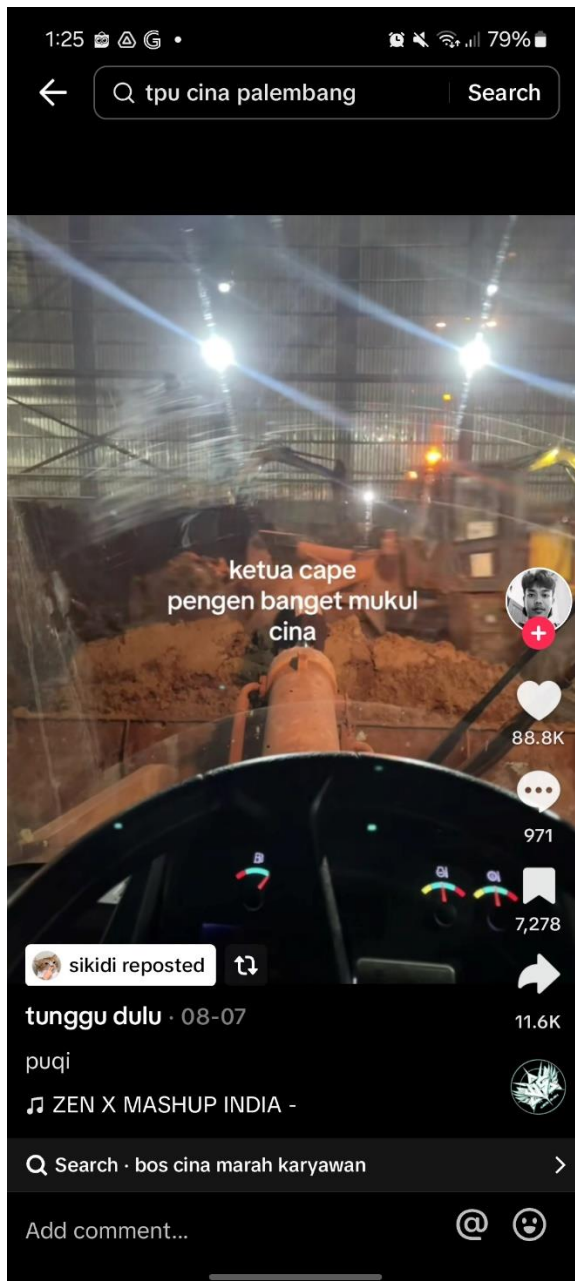
sikap kebencian terhadap orang yang berbeda dengan identitasnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan ketidaksetujuannya dengan penampilan *front line* dari Bandara Ngurah Rai Bali yang menggunakan *hijab*. Arya Wedakarna menilai bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan identitas masyarakat Bali dan harus diganti. Tanggapan yang dilakukan oleh Arya Wedakarna tidak membuahkan hasil yang baik. Melalui komentarnya, Arya Wedakarna memperoleh hujatan dari netizen di media sosial dan pemberhentian langsung dari jabatannya oleh Joko Widodo.

- 2.1.3. Penyalahgunaan media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk *hate-speech* dan bercanda dengan konteks rasial. Hadirnya media sosial sebagai sarana komunikasi mendorong fenomena sosial seperti tindakan rasisme dan diskriminasi sosial menjadi berubah wujud perlakuannya dan menjadi semakin bervariasi. Berikut ini merupakan contoh dari *hate-speech* dan bercandaan berbasis rasial di media sosial:



Gambar 2.3: Hasil tangkap layar dari ujaran kebencian berbasis ras yang peneliti temukan di media sosial.

Sumber: Laman instagram pribadi peneliti, 2024



Gambar 2.4: Hasil tangkap layar dari konten bercanda di media sosial Tiktok yang menggunakan ras sebagai premis kontennya.

Sumber: FYP Tiktok peneliti, 2024



duwiiikkkk
cina banyak omong

08-07 Reply

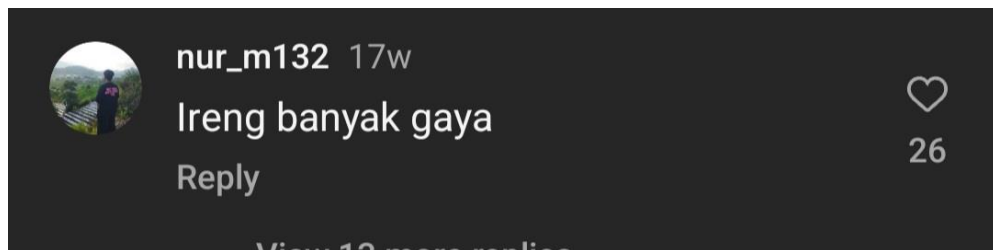


— View 30 replies ▾

Gambar 2.5: Hasil tangkap layar dari komentar rasis mengenai konten pada gambar 2.4.

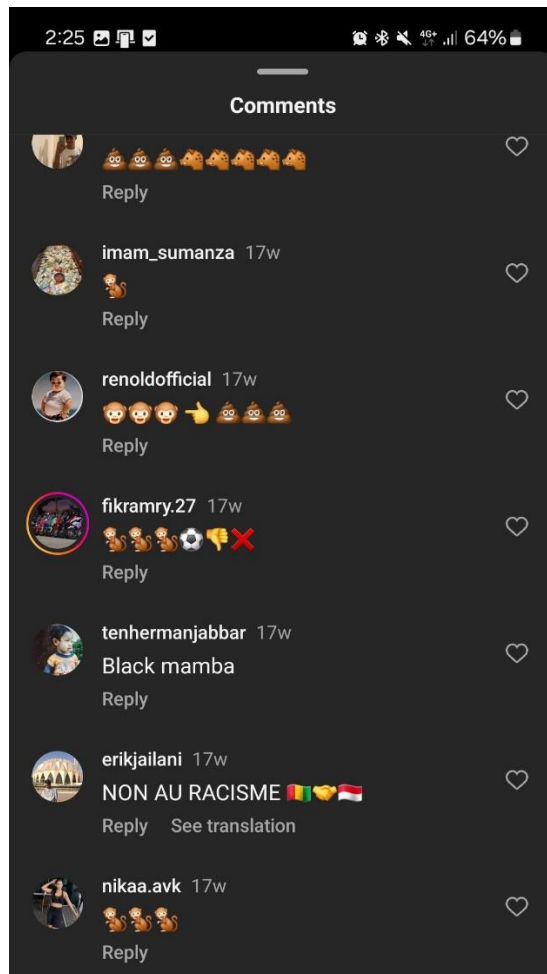
Sumber: Laman FYP Tiktok peneliti, 2024

2.1.4. Kejadian tentang rasisme dan diskriminasi di Indonesia pada Mei 2024 lalu dalam cabang olahraga sepakbola. Tindakan rasisme yang terjadi berupa netizen Indonesia yang melakukan cercaan dan melontarkan komentar rasis kepada tim sepakbola Negara Guinea karena kegagalan Timnas Indonesia untuk lolos Olimpiade 2024. Beberapa komentar dari netizen tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6: Hasil tangkap layar dari komentar rasis yang dilontarkan netizen di laman Instagram @joueurs_gn.

Sumber: Laman Instagram @joueurs_gn, 2024.



Gambar 2.7: Hasil tangkap layar dari komentar rasis yang dilontarkan netizen di laman Instagram @joueurs_gn.

Sumber: Laman Instagram @joueurs_gn, 2024.



Gambar 2.6: Hasil tangkap layar dari komentar rasial yang dilontarkan netizen di laman Instagram @joueurs_gn.
Sumber: Laman Instagram @joueurs_gn, 2024.

Melalui beberapa contoh kasus dari tindakan rasisme dan diskriminasi sosial di Indonesia akhir-akhir ini, dapat disimpulkan bahwa iklim rasisme di Indonesia masih kental. Berbagai prasangka, stereotipe, dan adanya supremasi di dalam kelompok masyarakat, mendorong terbentuknya perilaku rasisme di media baru.

2.2. Sejarah Rasisme Tionghoa Di Indonesia

2.2.1. Awal Mula Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa Muncul

Rasisme, diskriminasi sosial, dan kebencian terhadap Etnis Tionghoa telah ada sejak 400 tahun yang lalu, saat VOC atau kongsi dagang Belanda datang ke Indonesia. Etnis Tionghoa menjalani hubungan baik dengan penduduk setempat selayaknya penduduk lokal dan pedagang asing. Namun hubungan baik tersebut mulai berubah ketika VOC datang ke Indonesia dan menjadikan Etnis Tionghoa sebagai rekan dagang dari VOC. Hal tersebut menjadi masalah karena hak istimewa tersebut dianggap memecah-belah oleh pedagang setempat. Selain itu, Etnis Tionghoa pada saat itu juga diberi wewenang khusus untuk menjadi pemungut pajak bagi pedagang dan masyarakat lokal. Hal tersebut menyulut kebencian masyarakat dan pedagang lokal terhadap Etnis Tionghoa. Berbagai stereotipe negatif dan generalisasi sosial terhadap Etnis Tionghoa mulai bermunculan, seperti Masyarakat Jawa yang menganggap orang Tionghoa sebagai “pemeran” dan orang yang “pelit”.

2.2.2. Tragedi Geger Pecinan atau Tragedi Angke (Tahun 1740)

Hubungan baik antara Etnis Tionghoa dan kongsi dagang VOC sebagai rekan dagang tidak berlangsung lama. Hak istimewa yang diberikan VOC kepada Etnis Tionghoa mulai dirasa merugikan bagi Etnis Tionghoa. Iwan (2014) menjelaskan bahwa adanya penetapan kebijakan baru seperti penerapan pajak 15 ringgit bagi imigran Tionghoa yang baru datang di Indonesia dan kewajiban bagi Masyarakat Tionghoa untuk memiliki *permissie brief* atau izin legal untuk menetap di Batavia dengan membayar sebesar 2 ringgit, memberatkan imigran Tionghoa. Dengan penetapan pajak dan kewajiban atas kepemilikan izin untuk tinggal di Indonesia, mendorong adanya imigran gelap dari Masyarakat Tionghoa. Hal tersebut mendorong kekerasan dan diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa bermunculan.

Beberapa bentuk tindakan diskriminasi yang dialami Masyarakat Tionghoa di bawah kolonialisasi Belanda adalah sebagai berikut:

- Munculnya kecurigaan dan stereotipe negatif dari VOC terhadap imigran Tionghoa.
- Tindakan sewenang-wenang VOC terhadap imigran Tionghoa, seperti razia dan pembuangan imigran Tionghoa ke Sri Lanka.
- Pelucutan hak Masyarakat Tionghoa.
- Pembantaian massal terhadap masyarakat yang beretnis Tionghoa.

Melalui beberapa tindakan diskriminasi tersebut memicu perlawanan dari Masyarakat Tionghoa berupa penyerangan terhadap pos-pos dan benteng Belanda di Batavia, Tangerang, dan Jatinegara. Tragedi Geger Pecinan mendorong munculnya efek domino bagi VOC. Mulai dari turunnya produksi komoditas gula, pemberhentian Gubernur Jendral Adriaan Valckenier dari masa jabatannya karena dianggap sebagai pemicu adanya peristiwa Geger Pecinan, dan penempatan tempat tinggal bagi Masyarakat Tionghoa yang dikenal dengan istilah Pecinan. Kebijakan pemerintah kolonial memosisikan Etnis Tionghoa sebagai pihak yang diintimidasi. Berbagai rentetan peristiwa pada Geger Pecinan dianggap sebagai akar permasalahan dan sumber di mana diskriminasi sosial terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia dimulai.

2.2.3. Diskriminasi Sosial di Masa Orde Baru (Tahun 1965-1967)

Kebencian dan diskriminasi sosial terhadap Masyarakat Tionghoa di Indonesia terus mengakar hingga masa orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Melalui

tragedi G30SPKI ini menunjukkan bahwa diskriminasi rasial yang dialami oleh Masyarakat Tionghoa merupakan diskriminasi yang konstruktif dari pemerintahan. Beberapa kebijakan-kebijakan di masa orde baru yang diskriminatif terhadap Etnis Tionghoa adalah sebagai berikut:

- Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) khusus bagi Warga Tionghoa sehingga membedakan mereka dengan penduduk asli Indonesia.
- Warga Tionghoa dilarang atas kepemilikan tanah di daerah pedesaan.
- Larangan bagi Masyarakat Tionghoa dan keturunannya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara dan pegawai negeri sipil.

Setelah itu, di tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan baru bagi Masyarakat Tionghoa, yang bertujuan untuk mendorong asimilasi budaya antara Masyarakat Tionghoa dan masyarakat setempat. Beberapa kebijakan Presiden Soeharto adalah sebagai berikut:

- Larangan perayaan hari raya dan hari tradisional berkebudayaan Tionghoa.
- Larangan didirikannya sekolah untuk Masyarakat Tionghoa. Masyarakat Tionghoa yang berusia anak hingga remaja diwajibkan untuk bersekolah di sekolah umum swasta dan negeri.
- Larangan penyebaran dan penerbitan Aksara Cina dan Bahasa Cina
- Larangan bagi Masyarakat Tionghoa untuk menggunakan nama yang memiliki unsur Tionghoa dan diwajibkan untuk mengganti nama yang memiliki unsur lokal atau pribumi.

2.2.4. Diskriminasi Sosial di Masa Orde Baru (Tahun 1998)

Segala bentuk diskriminasi sosial berdasarkan ras, penindasan sosial, dan tindakan rasisme yang terjadi pada masa ini merupakan titik di mana prasangka dan trauma dari Masyarakat Tionghoa sedang marak-maraknya.

Kerusuhan Mei 1998 atau yang dikenal dengan istilah Tragedi 98 merupakan peristiwa di mana krisis moneter menghantam Indonesia. Beberapa oknum yang memiliki kepentingan politik mengkambinghitamkan warga yang beretnis Tionghoa sebagai pemicu masalah moneter tersebut. Hal tersebut mendorong munculnya kekerasan dan prasangka buruk terhadap warga yang berketurunan Tionghoa.

Beberapa tindakan diskriminasi sosial yang terjadi pada Kerusuhan Mei 1998 adalah sebagai berikut:

- Kerusuhan massal berdasarkan isu rasial yang konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Medan, Solo, dan Jakarta. Melalui kerusuhan tersebut mendorong beberapa warga berketurunan Tionghoa yang bertempat tinggal di daerah tersebut meninggalkan Indonesia hingga kerusuhan kembali mereda.
- Beberapa kasus pemerkosaan yang menimpa wanita dan perempuan yang berketurunan Tionghoa.
- Amukan massa dan penjarahan toko-toko yang dimiliki oleh warga berketurunan Tionghoa.
- Penganiayaan dan kekerasan fisik terhadap Masyarakat Tionghoa atas dasar tuduhan rasial.

Beberapa bentuk tindakan diskriminasi sosial tersebut merupakan gambaran dari diskriminasi yang dialami oleh Warga Tionghoa di tahun 1998. Peristiwa tersebut berakhir dengan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari beberapa kampus di Indonesia yang menyebabkan turunnya Soeharto dari masa pemerintahan. Dalam upaya penyelesaian atas peristiwa tersebut, Presiden Gusdur, selaku presiden yang menggantikan kedudukan Soeharto, menghapus diskriminasi sosial terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000. Keputusan presiden tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2000 untuk menghapus dan mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina.

2.3. Rasisme Dalam Film-Film Di Indonesia

Film sebagai salah satu bentuk media dari komunikasi massa dianggap mampu untuk memberikan perubahan terhadap masyarakat berdasarkan realitas yang diangkat menjadi topik di film tersebut. Menurut Stanley (2012:231) menyatakan bahwa media film dianggap mampu untuk mempengaruhi khalayak karena sifatnya yang audio dan visual, film mampu menceritakan tentang realitas-realitas yang ada di kehidupan nyata. Selain digunakan sebagai media rekreasi dan hiburan, film merupakan sebuah media yang dapat memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi penontonnya. Tidak jarang

produser film, khususnya di Indonesia kerap kali mengangkat isu atau fenomena sosial untuk dijadikan sebuah film. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia sadar bahwa terdapat isu sosial maupun realitas sosial yang sebenarnya terjadi di sekitar mereka, contohnya fenomena rasisme dan diskriminasi sosial.

Wibowo (2006:196) mendeskripsikan film sebagai alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan berbagai bentuk pesan kepada khalayak dalam bentuk cerita atau narasi dalam bentuk audio dan visual. Wibowo menegaskan bahwa film sebagai medium ekspresi artistik memiliki daya dan kekuatan yang nantinya akan berimplikasi terhadap masyarakat sebagai komunikan. Melalui pernyataan tersebut membuktikan film sebagai media komunikasi massa berperan penting dalam proses penyebaran nilai dan informasi kepada masyarakat.

Salah satu isu atau fenomena sosial di masyarakat yang dilirik produser film untuk dijadikan tema film adalah rasisme. Definisi rasisme menurut Van Dijk (2019:1) adalah suatu ideologi mengenai sistem sosial kompleks yang mendorong munculnya dominasi dan ketidaksetaraan di dalam sistem sosial tersebut. Rasisme ini merupakan suatu ideologi yang sangat berbahaya karena dapat mendorong munculnya masalah-masalah sosial lain seperti, diskriminasi sosial, perpecahan, dan konflik antar ras dan suku budaya. Melalui fenomena dan masalah sosial tersebut, beberapa produser film di tanah air mencoba untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya saling toleransi, saling menghargai, dan menjaga keberagaman budaya di Indonesia melalui karya film yang bertemakan rasisme. Brilio.net (2018, Februari 14) 5 film ini ceritakan keberagaman di indonesia, sindir yang suka rasis. Diakses dari <https://www.brilio.net/film/5-film-ini-ceritakan-keberagaman-di-indonesia-sindir-yang-suka-rasis-180214i.html>. Beberapa film-film karya anak bangsa yang menceritakan keberagaman adalah sebagai berikut:

- ? (Tanda Tanya)

Sebuah film yang diproduksi oleh Hanung Bramantyo yang rilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan pluralisme dan perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Film ini menyelipkan pesan dan nilai tentang toleransi antar masyarakat yang berbeda etnis dan toleransi antar agama.

- Cin(T)a

Merupakan karya dari Sammaria Simanjuntak pada tahun 2009 lalu. Film ini mengisahkan tentang perjuangan asmara antara dua pribadi yang

berbeda etnis dan kepercayaan. Di dalam film tersebut menyiratkan nilai-nilai dan pesan mengenai latar belakang dari dua pribadi yang berasal dari kebudayaan yang bertolak belakang dan perjuangan asmara mereka sehingga dapat menjadi pasangan hingga mereka menikah.

- 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta

Sebuah film karya Benni Setiawan yang rilis pada tahun 2010. Mengisahkan tentang seorang pemuda berketurunan Arab yang menjalin hubungan asmara dengan pemudi berketurunan Manado. Film ini mengangkat tema “perbedaan” dan bagaimana sepasang kekasih tersebut menghadapi perbedaan latar belakang dari keduanya.

- Bhinneka

Sebuah *short movie* yang diproduksi oleh *Underdog Production* yang rilis pada tahun 2017. Film tersebut mengangkat tema tentang keberagaman di Tanah Air. Film ini menyiratkan pesan dan nilai mengenai situasi masyarakat yang pada saat itu saling membenci satu dengan lainnya berdasarkan perbedaan suku dan agama.

Beberapa film di atas merupakan contoh film-film Tanah Air yang mengangkat tema fenomena sosial berupa rasisme untuk dijadikan suatu karya seni berwujud audio dan visual. Melalui film-film tersebut, penggambaran rasisme berupa tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Selain itu, bentuk tindakan rasisme lainnya adalah upaya kelompok minoritas untuk menjaga eksistensi mereka di lingkungan masyarakat yang mayoritas. Beberapa contoh dari visualisasi rasisme tersebut merupakan representasi dari bagaimana bentuk dan contoh tindakan rasisme yang terjadi di masyarakat saat ini.

2.4. Sistemasi Pengerjaan Penelitian

Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini, nantinya peneliti akan menggunakan pendekatan semiotika milik John Fiske dalam penjabaran analisis representasi rasisme. Setelah memilah sebanyak 20 leksia penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian, peneliti akan menganalisis kode-kode yang berupa, teks dan visual dalam adegan atau leksia yang telah dipilih. Setelah itu, peneliti akan menjabarkan hasil analisis yang menggunakan pendekatan semiotika

John Fiske, di mana terdapat sebanyak tiga level analisis. Setelah menjabarkan ketiga level tataran semiotika milik John Fiske, peneliti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk representasi dan visualisasi dari rasisme terhadap Etnis Tionghoa yang terkandung dalam Film *Ngenest*. Setelah peneliti mendeskripsikan bentuk-bentuk rasismenya, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan.